

PENGELOLAAN KEUANGAN PESANTREN KECAMATAN CIBADAK LEBAK BANTEN

¹⁾Muhammad Anwar Fathoni, ²⁾Toni Priyanto, ³⁾Mira Rahmi
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
mfathoni@upnvj.ac.id, tonidaffa2002@gmail.com, mirarahmi@gmail.com

ABSTRAK

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan pesantren dan memberikan pelatihan mengenai pencatatan keuangan pesantren sesuai dengan standar yang berlaku yang mengacu pada Pedoman Akuntansi Pesantren yang diterbitkan oleh Bank Indonesia yang merujuk pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).

Program pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan metode *workshop* yang diberikan kepada pengelola pesantren khususnya bagian administrasi dan keuangan. *Workshop* dilakukan dengan mengundang 36 (tiga puluh enam) pesantren yang tersebar di Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Banten yang dalam pelaksanaannya difasilitasi oleh aparat Kecamatan Cibadak. Dalam kegiatan tersebut peserta diberikan paparan materi dan simulasi pencatatan atas transaksi operasional dan keuangan pesantren hingga mampu mengidentifikasi transaksi keuangan pesantren dan menyusun laporan keuangan.

Hasil yang dicapai dari program ini adalah pemahaman dan implementasi panduan pencatatan keuangan yang telah disosialisasikan dalam mencatat kegiatan operasional pesantren. Sehingga diharapkan pengelolaan pesantren yang profesional dapat terwujud.

Kata Kunci: Akuntansi, ETAP, Keuangan, Pesantren

1. PENDAHULUAN

Pelaksanaan pendidikan di Indonesia merupakan salah satu upaya dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa. Indonesia menjadikan pendidikan sebagai upaya strategis untuk meningkatkan mutu kebudayaan dan peradabannya sebagai dua hal yang tak terpisahkan. Pendidikan tanpa orientasi budaya akan menjadi gersang dari nilai-nilai luhur. Sebaliknya kebudayaan tanpa pendukung-pendukungnya yang sadar dan terdidik pada akhirnya akan memudar sebagai sumber nilai.

Masyarakat Indonesia memiliki peran dalam pengembangan pendidikan di Indonesia. Munculnya berbagai lembaga pendidikan merupakan bentuk dari penyelenggaraan pendidikan masyarakat, termasuk pendidikan di pesantren, merupakan wujud nyata dari sinergitas masyarakat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I pasal 1 (16) “Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh dan untuk masyarakat.” Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia telah terbukti memberikan kontribusi nyata dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, pondok pesantren telah menjadi pusat kegiatan pendidikan yang telah berhasil menanamkan semangat kewiraswastawan dan semangat kemandirian, yang tidak menggantungkan diri pada orang lain. (Departemen Agama RI, 2003).

Pesantren merupakan sebuah lembaga yang memiliki potensi yang besar dalam mengembangkan kerangka sistem pendidikan nasional. Pada umumnya, pendidikan pesantren bertujuan menyebarkan ajaran-ajaran keagamaan sebagai benteng moral dan mental dalam menghadapi kemajuan zaman termasuk kemajuan ilmu dan teknologi. Dengan demikian, keseimbangan antara ilmu agama dan ilmu non-keagamaan dimaksudkan agar dapat membentuk lulusan yang siap dalam menerapkan nilai-nilai moral Islam dalam menghadapi perubahan masyarakat.

Sebagai lembaga pendidikan, pesantren tentu saja memiliki tujuan yang ingin dicapainya. Untuk mengidentifikasi tujuan pendidikan pesantren tersebut diperlukan identifikasi terhadap pesantren itu sendiri. Seberapa jauh tujuan yang ingin dicapai oleh pesantren tercermin dari seberapa lengkap elemen pesantren yang dimiliki. Suatu pesantren dinilai memiliki kredibilitas jika terdapat elemen pondok, masjid, pengajaran kitab-kitab Islam klasik, santri, dan kiai (Damopolii, 2011).

Kecamatan Cibadak Lebak Banten merupakan kecamatan dengan 15 desa yang menyumbang angka kemiskinan signifikan di Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Meskipun demikian, Kecamatan Cibadak memiliki potensi sumber daya yang luar biasa. Tercatat setidaknya ada 35 pesantren yang tersebar di seluruh penjuru Kecamatan Cibadak. Besarnya angka pesantren ini merupakan bagian dari potensi dan nilai tambah bagi Kecamatan Cibadak, mengingat berbagai sumber daya pesantren yang dapat digunakan untuk pemberdayaan masyarakat.

Banyaknya kuantitas pesantren di Kecamatan Lebak tersebut nyata masih belum bisa memberikan kontribusi signifikan bagi kehidupan ekonomi masyarakat. Penulis menilai mayoritas pesantren tersebut masih memiliki paradigma peran pesantren hanya sebatas pusat pengkaderan pemikir-pemikir agama (*center of excellence*) dan lembaga yang mencetak sumber daya manusia (*human resource*). Padahal, pesantren mampu memberikan kontribusi lebih dengan menjadi lembaga yang dapat melakukan pemberdayaan pada masyarakat (*agent of development*), terutama pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar (Azyumardi Azra, 1997).

Tabel 1
Pesantren Salafiyah dan Pesantren Modern di Cibadak

No	Nama Desa/ Kelurahan	Nama Pontren	Nama Pimpinan	Kategori (Salafiyah, Modern)
1	2	3	4	6
1	Tambakbaya	Anwarul Ulum	KH.Sukatma Ahmad	Salafiyah
2	Tambakbaya	Darul Muta'alimin	Kyai Edi Jubaedi	Salafiyah
3	Tambakbaya	Minhajul Ikhwan	Kyai Idis	Salafiyah
4	Tambakbaya	Roudatul Aulad	KH. Atori	Salafiyah
5	Tambakbaya	Darul Auladi Saliman	Kyai Encep Jabir	Salafiyah
6	Tambakbaya	Nurul Hikmah	Kyai Ocong Humaedi	Salafiyah
7	Tambakbaya	Miftahurrohman	Kyai Rohyanu	Salafiyah
8	Tambakbaya	Al-Hijaiyah	Kyai Ujang	Salafiyah
9	Bojongleles	Nurul Hidayah	Ust. Aang Kurnaedi	Salafiyah
10	Bojongleles	Darur Rohman AS-Sajidah	Kiyai Abdur Rohman	Salafiyah
11	Bojongleles	Alhidayatul Muhtadiin	Kyai M. Solihin	Salafiyah
12	Bojongleles	Nurul Ibtida	Kyai Muksin Al-Jubair	Salafiyah
13	Bojongleles	Tahfidzil Quran	Kyai Najudin	Salafiyah
14	Bojongleles	API Al-Amanah	Kyai Hudri	Salafiyah
15	Kaduagung Timur	Nur Faujan	Kyai Jaenus Solihin	Salafiyah
16	Kaduagung Timur	Bani Ali	KH. Jaenal Arifin	Salafiyah
17	Kaduagung Timur	Nurul Falah	KH.A Rafiudin	Kombinasi
18	Kaduagung Timur	Baitul Falah	Ustad Rifai	Salafiyah
19	Kaduagung Timur	AL-Hidayah	KH Izzudin Lc	Moderen
20	Panancangan	Bani Sueb	Kyai A Dimiyati	Salafiyah
21	Panancangan	Modern ZAM- ZAM	H. Dadan Maulana Darmawan	Moderen
22	Asem Margaluyu	Tarbiyatul Atfhal	KH. Ahmad Sudendra	Salafiyah

23	Asem Margaluyu	Tarbiaatul Aulad	K Dimyathi	Salafiyah
24	Malabar	Manbaul Ulum	Ust. M Ues Al Qurni	Salafiyah
25	Bojong Cae	Hidayatul Manan	Kyai Nahrowi	Salafiyah
26	Bojong Cae	Nurul Iman	Ustad Henda	Salafiyah
27	Pasar Keong	Modern Manahijussadat	Drs. KH Sulaiman Efendi M.Pd.I	Moderen
28	Pasar Keong	Addu'aul Falah	Kyai Ahmad Damiri Albantani	Salafiyah
29	Pasar Keong	Bani Rohman	Ust. Wawan Ridwan	Salafiyah
30	Cibadak	Subulus salam	Kyai Sainan	Salafiyah
31	Cibadak	Nurwidia	Drs. KH Busro	Kombinasi
32	Cibadak	Miftahul Ula	Kyai Mifroji	Salafiyah
33	Asem	Al Hakir Fakir	Ust Idris	Salafiyah
34	Cimenteng Jaya	Darul Quran Al Baraqah	Kyai Mameh	Salafiyah
35	Cimenteng Jaya	Nurul Hidayah	Kyai Imam Nablawi	Salafiyah

Sumber: *Tenaga Teknis Lapangan Bidang Pesantren Kecamatan Cibadak, 2018.*

Sejalan dengan penyelenggaraan pendidikan formal, beberapa pesantren telah mengalami perkembangan pada aspek manajemen, organisasi, dan administrasi pengelolaan keuangan. Dari beberapa kasus, perkembangan ini dimulai dari perubahan gaya kepemimpinan pesantren; dari kharismatik ke rasionalistik, dari otoriter-paternalistik ke diplomatik-partisipatif, atau dari *laissez faire* ke demokratik. Sebagai contoh kasus, kedudukan “Dewan Kiai” di Pesantren Teru Ireng menjadi bagian atau salah satu unit kerja kesatuan administrasi pengelolaan penyelenggaraan pesantren, sehingga pusat kekuasaan sedikit terdistribusi di kalangan elit pesantren, sehingga pusat kekuasaan sedikit terdistribusi di kalangan elit pesantren dan tidak terlalu terpusat pada kiai. Pengaruh sistem pendidikan formal menuntut kejelasan pola hubungan dan pembagian kerja di antara unit-unit kerja (Masyhud, 2005).

Di sisi lain, kemajuan yang ada pada pesantren ternyata tidak diikuti oleh peningkatan sumber daya manusia yang ada, terutama dalam konteks administrasi dan manajemen. Manajemen di pesantren pada saat ini masih ada yang dikelola secara tradisional. Hal tersebut dapat dilihat dari proses manajemen atau pengelolaan keuangan pondok pesantren. Hampir semua pesantren, terutama yang besar dan menyejarah, tumbuh dan berkembang atas hasil tangan dingin sang pengasuh atau kiai. Bangunan sederhana yang ada dalam kompleks pesantren terdiri atas hasil keringatnya. Demikian pula ketika pesantren itu akhirnya bisa berdiri, terselenggara, dan menjadikan lembaga yang lengkap dengan berbagai satuan pendidikan. Pengasuh atau kiai mendidik para santrinya tanpa bergantung kepada orang lain. Sejarah awal pesantren memperlihatkan kiai pesantren adalah sekaligus pedagang atau petani. Jika ada tim penopang, maka itu adalah keluarga sendiri. Gejala ini di beberapa tempat masih berlangsung hingga saat ini (Nafi, 2007).

Sistem pencatatan keuangan di kebanyakan pesantren di Indonesia juga masih menggunakan metode tradisional. Sistem pencatatan yang digunakan masih menggunakan sistem pencatatan *single entry*, yaitu setiap transaksi hanya dicatat pada bagian debit atau kredit atas satu transaksi. Sistem seperti ini mungkin masih cocok untuk pesantren kecil dengan arus kas yang tidak besar (Pratolo, 2001). Namun, untuk pesantren besar dengan tuntutan transparansi dan akuntabilitas, tentunya sistem *single entry* tidak dapat lagi digunakan. Hal ini merupakan faktor utama untuk menghasilkan informasi keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada *stakeholders* seperti pengasuh pesantren dan wali santri.

Pengelolaan keuangan yang baik ini sebenarnya juga merupakan bagian dari upaya melindungi personil pengelolaan pesantren (kiai, ustadz/ustadzah, atau pengelola lainnya) terhadap pandangan yang kurang baik dari luar pesantren. Selama ini banyak pesantren yang tidak memisahkan antara harta kekayaan pesantren individu, walaupun disadari bahwa pembiayaan pesantren justru lebih banyak bersumber dari kekayaan individu sebab sumber-sumber lain penopang pesantren kurang memadai (Mastuhu, 2000)

Pesantren dengan segala sumber daya yang dimiliki seharusnya dapat memberikan kontribusi nyata terhadap masyarakat sekitar. Selain sebagai lembaga masyarakat yang menjadi panutan spiritual masyarakat, pesantren dapat berkontribusi dalam pembangunan dan perkembangan ekonomi masyarakat. Namun, sebelum sampai pada tahap ini, pesantren harus berbenah diri dengan melakukan perbaikan pada sumber daya manusianya, terutama untuk manajemen keuangan. Sehingga, dibutuhkan berbagai tindakan konkrit melalui penyuluhan, pelatihan maupun pembekalan manajemen keuangan untuk para pengelola pesantren agar dapat mengatur dan mengelola aset dan lembaganya secara profesional. Pada tahap ini, kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) difokuskan pada penyuluhan dan pelatihan pencatatan keuangan pesantren menggunakan metode SAK ETAP, yaitu standard akuntansi keuangan bagi entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik. Diharapkan langkah ini sebagai tahap awal bagi pesantren untuk melebarkan kontribusinya tidak hanya pada ranah pendidikan, namun juga dalam pemberdayaan ekonomi umat.

2. PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Soal *pretest* diberikan seputar pemahaman umum tentang pencatatan transaksi keuangan pesantren yang terdiri dari 15 butir soal pilihan berganda dengan nilai tertinggi sebesar 100 dan terendah 0. Berdasarkan Tabel 1 di atas, hasil *pretest* diperoleh sebanyak 62% peserta mendapatkan nilai <60, 28,8% peserta mendapatkan nilai antara 60-79, dan 9,2% mendapatkan nilai antara 80-100 dengan nilai rata-rata *pretest* adalah 50,6. Dari hasil *pretest* tersebut terlihat bahwa peserta yang memiliki pemahaman umum akan pencatatan transaksi keuangan pesantren sudah ada namun masih dalam persentase yang kecil, sehingga dapat disimpulkan para peserta belum memiliki pemahaman yang baik terkait materi yang akan disampaikan, yaitu tentang pencatatan keuangan pesantren.

Dari hasil *posttest* pada Tabel 1 di atas, terlihat pemahaman peserta menunjukkan adanya peningkatan. Persentase peserta yang mendapatkan nilai <60 turun dari 62% menjadi 22%. Sedangkan persentase peserta yang mendapatkan nilai antara 60-79 meningkat, dari 28,8% menjadi 42,5%. Adapun peserta yang mendapatkan nilai antara 80-100 mencapai 35,5%, dengan nilai rata-rata sebesar 69,6. Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan pemahaman yang cukup signifikan terkait materi yang disampaikan dalam kegiatan ini. Sehingga, dilihat dari aspek pemahaman, maka kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini cukup berhasil meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta kegiatan.

Sementara itu, dari aspek efektivitas kegiatan PKM ini, ada 4 hal yang diukur, yaitu tingkat kepuasan, kesesuaian kebutuhan, metode penyampaian materi dan kerjasama tim. Jika melihat Gambar 1 yang menunjukkan tingkat kepuasan peserta, data di atas 80% peserta PPM sangat puas dan 20% peserta puas atas pelatihan yang diberikan. Hasil ini menunjukkan peserta memberikan respon positif atas kegiatan yang dilakukan dan diharapkan ini dapat meningkatkan pengetahuan siswa tentang pengelolaan keuangan pesantren.

Selanjutnya, Gambar 2 di atas menunjukkan persentase kesesuaian kegiatan PKM terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya para pengelola pesantren. Dari data di atas persentase respon peserta PPM yang menganggap kegiatan ini sangat sesuai dengan kebutuhan sebanyak 65% dan persentase respon yang menganggap sesuai sebanyak 35%. Hasil ini menunjukkan bahwa materi yang disampaikan dalam kegiatan ini relevan dengan kebutuhan dalam pengelolaan keuangan pesantren dan sangat diperlukan sebagai tambahan pengetahuan dan informasi untuk menunjang pengelolaan pesantren tersebut.

Gambar 3 di atas menunjukkan persentase jawaban peserta kegiatan tentang metode penyampaian materi dalam kegiatan PKM ini. Dari gambar tersebut menunjukkan bahwa pemahaman materi tentang pencatatan transaksi keuangan pesantren sebagian besar pada kategori sangat baik sebesar 87% dan 10% untuk kategori baik sedangkan untuk kategori pemahaman cukup sebesar 3%. Artinya, metode penyampaian materi dalam kegiatan ini cukup menarik dan berhasil.

Terakhir, Gambar 4 di atas menunjukkan persentase jawaban peserta tentang kerjasama tim PKM. Dari data tersebut, dapat diketahui bahwa peserta menilai kerjasama Tim PKM dalam melaksanakan kegiatan sangat baik. Persentase peserta yang menilai sangat baik sebanyak 90%, dan yang menilai baik sebanyak 10%. Hasil ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Tim PPM cukup efektif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Keberhasilan yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan diukur dalam 2 (dua) jenis parameter yaitu: dengan mengukur pengetahuan peserta sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan melalui *pretest* dan *posttest*, berikutnya dengan mengukur apakah pelaksanaan kegiatan tepat sasaran, efektif, sesuai dengan kebutuhan dan memberikan manfaat kepada para peserta atau tidak melalui kuisisioner yang diberikan diakhir kegiatan.

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 22 September 2018 di Ruang Serbaguna Kecamatan Cibadak Lebak Banten. Kegiatan dilakukan dalam bentuk *small group discussion* (SGD) yang dibagi dalam 4 sesi. Dalam paparan tiap-tiap sesi penyaji menyampaikan materi dan kemudian membuka forum diskusi.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan dapat diukur dari tingkat pemahaman peserta atas topik yang telah dipaparkan. Untuk melihat hal tersebut dibawah ini disajikan hasil pengukuran pemahaman peserta dalam bentuk *pretest* dan *posttest*.

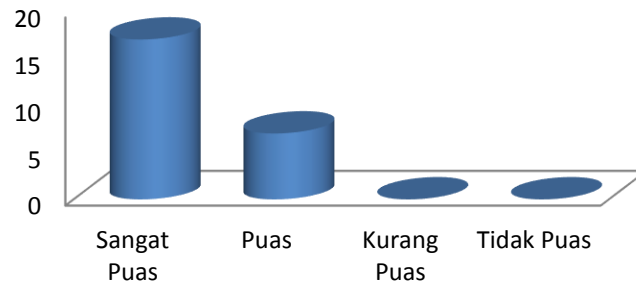
Tabel 1 Rekapitulasi *Pretest* dan *Posttest*

NO	PRETEST	POSTTEST	NO	PRETEST	POSTTEST
1	13	40	24	53	67
2	13	40	25	53	67
3	13	40	26	53	73
4	13	40	27	53	73
5	27	40	28	53	73
6	27	47	29	60	73
7	27	47	30	60	87
8	27	53	31	60	80
9	33	53	32	60	80
10	33	53	33	67	87
11	33	60	34	67	80
12	33	60	35	67	87
13	47	60	36	67	87
14	47	60	37	73	87
15	47	60	38	73	93
16	47	67	39	73	93
17	47	67	40	73	93
18	47	67	41	73	93
19	47	67	42	80	93
20	47	67	43	80	93
21	53	67	44	87	93
22	53	67	45	93	93
23	53	67	46		

Disamping pengukuran pemahaman peserta atas topik yang dipaparkan, tim pengabdian juga melakukan penyebaran kuisisioner yang diisi oleh peserta yang bertujuan untuk mengevaluasi efektifitas kegiatan yang telah dilaksanakan. Di bawah ini disajikan tabel hasil kuisisioner.

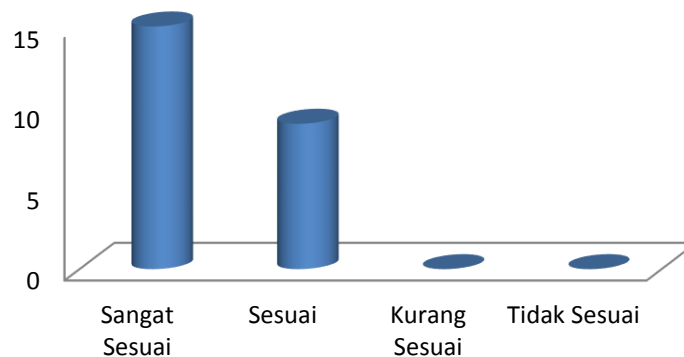
Indikator pertama yang diukur untuk melihat keberhasilan pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) adalah tingkat kepuasan peserta. Jika respon yang ditunjukkan peserta pada

kategori positif atau puas, maka dapat diartikan bahwa kegiatan tersebut punya kesan yang baik bagi peserta. Dari kegiatan PKM yang telah dilaksanakan tampak peserta begitu antusias mengikuti kegiatan. Hal ini juga tercermin dari angket yang diberikan kepada peserta kegiatan PKM seperti pada gambar 2 berikut.



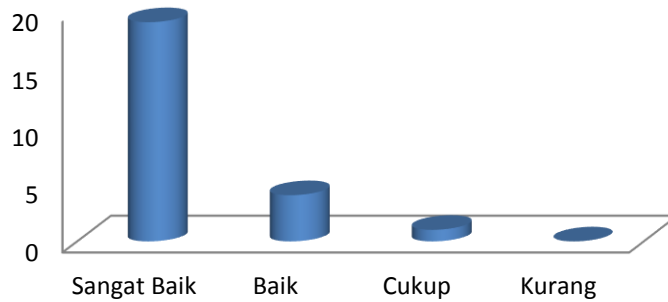
Gambar 1. Respon Peserta PKM

Indikator kedua yang di ukur adalah kesesuaian kegiatan PKM dengan kebutuhan masyarakat sasaran. Harapan Tim PKM UPNVJ adalah materi yang diberikan dapat menjadi alternatif solusi atau pemecahan masalah yang ada, dalam hal ini memberikan informasi atas pencatatan transaksi keuangan pesantren yang selama ini belum dilakukan oleh para pengelola secara profesional. Hal ini menjadi cukup penting mengingat peserta yang mengikuti kegiatan ini adalah para pengelola pesantren, dimana terdapat kesesuaian antara kebutuhan di lapangan dengan topik yang diberikan. Disamping itu pengetahuan ini dapat menjadi bekal para pengelola pesantren untuk mengelola keuangan pesantrennya secara profesional.



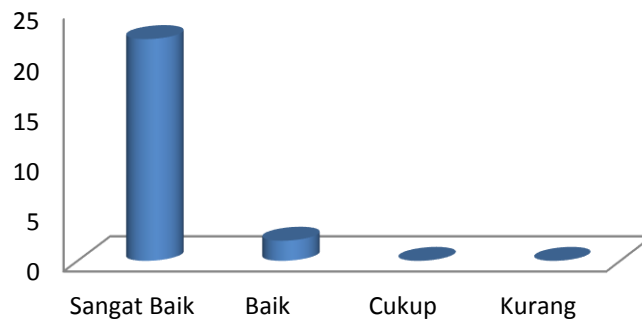
Gambar 2. Respon Kesesuaian Kebutuhan

Indikator berikutnya adalah mengukur efektifitas metode yang digunakan dalam penyampaian materi pelatihan. Metode yang digunakan adalah melalui metode ceramah yang diselingi dengan diskusi terbuka dan penyampaian contoh atau pengalaman-pengalaman praktis dari penyaji. Peserta dimotivasi untuk bertanya dan berdiskusi dengan diberikan sampel-sampel kasus aktual sehingga peserta dapat tergambar pada kondisi praktis.



Gambar 3. Metode Penyampain Materi

Indikator terakhir yang diukur adalah efektifitas kerjasama Tim PPM dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan. Hal ini dilakukan guna mengukur apakah tim mampu melaksanakan kegiatan secara efektif, sehingga manfaat dari kegiatan yang dilaksanakan dapat dirasakan oleh peserta.



Gambar 4. Kerjasama Tim

Adapun rekapitulasi hasil kuesioner mengenai efektifitas kegiatan PKM ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. Rekapitulasi Efektivitas PKM

No	Pertanyaan	SP/SS/SB		P/S/B		KP/KS/C/P/TS/K		Total			
		X	%	X	%	X	%	X	%		
1	Apakah dengan adanya pelatihan tentang pedoman pencatatan keuangan pesantren ini, peserta mendapatkan tambahan ilmu dan merasa puas ?	36	80%	9	20%	0	0%	0	0%	45	100%
2	Apakah materi pelatihan tentang pedoman pencatatan keuangan pesantren yang diberikan sesuai dengan kebutuhan peserta?	29	65%	16	35%	0	0%	0	0%	45	100%
3	Bagaimana penilaian peserta terhadap metode penyampaian materi pelatihan tentang pedoman pencatatan keuangan pesantren?	39	87%	5	11%	1	2%	0	0%	45	100%
4	Apakah kerjasama tim PPM UPNVJ dengan mitra atau peserta kegiatan berjalan dengan baik?	40	90%	5	10%	0	0%	0	0%	45	100%

Jumlah Peserta 45 orang

Pesantren dan Ekonomi

Kata pesantren telah masyhur dikenal oleh masyarakat Indonesia. Pesantren diidentikkan dengan lembaga pendidikan yang sangat kental dengan aspek religinya. Nurkholis Madjid menyatakan bahwa pesantren mengandung makna keislaman sekaligus keaslian (indigenous) Indonesia. Kata pesantren kemudian dipahami sebagai tempat pendidikan yang mayoritas materi pendidikannya adalah keagamaan, dimana para peserta didik (santri) bermukim atau tinggal di tempat yang disediakan oleh pihak pesantren, yang kemudian disebut dengan pondok. Oleh karena itu, istilah “pondok pesantren” digunakan untuk menunjukkan suatu tempat dimana terdapat kegiatan pendidikan yang diikuti oleh para peserta didik yang tinggal di lokasi tempat pendidikan.

Pondok pesantren (ponpes) secara teknis merupakan suatu tempat yang dihuni oleh para santri. Hal ini menunjukkan makna penting dari ciri-ciri ponpes sebagai sebuah lingkungan pendidikan yang terintegrasi. Sistem pendidikan ponpes sebetulnya sama dengan sistem yang dipergunakan akademi militer misalnya, yakni dicirikan dengan adanya sebuah bangunan beranda, yang disitu seseorang dapat mengambil pengalaman secara integral (Wahid, 2001).

Hingga kini, terdapat berbagai bentuk dan “varian” pondok pesantren di Indonesia. Soedjoko yang dikutip oleh Marlina membuat lima kategorisasi pesantren menurut pola elemen dasarnya. Pola I adalah pesantren yang terdiri dari hanya masjid dan rumah kyai; Pola II adalah pesantren yang terdiri dari masjid, rumah kyai, dan pondok. Pola III pesantren yang terdiri dari masjid, rumah kyai, pondok, dan madrasah. Pola IV terdiri dari masjid, rumah kyai, pondok, madrasah, dan tempat keterampilan. Terakhir, pola V adalah pesantren yang terdiri dari masjid, rumah kyai, pondok, madrasah, tempat keterampilan, universitas, gedung pertemuan, tempat olah raga, dan sekolah umum (Marlina, 2014).

Pada mulanya, fungsi pesantren di Indonesia hanya sebatas lembaga pendidikan keagamaan. Kini, peran pesantren tidak hanya sebagai lembaga pendidikan saja. Unsur kyai yang ada di pesantren merupakan roda utama penggerakannya, di mana kyai tidak hanya sebatas melakukan transfer ilmu kepada para santrinya, namun peran kyai sebagai agen perubahan sosial ekonomi. Hiroko Horikoshi (1987) dan Clifford Geertz (1981) menyebut fenomena ini sebagai cultural broker, yaitu salah satu gambaran bagaimana fungsi mediasi yang dapat dilakukan ulama untuk mengkomunikasikan antara berbagai kepentingan yang muncul di suatu komunitas. Ulama dapat berperan sebagai “corong” suatu kepentingan dan tujuan tertentu karena kekuatan yang mereka miliki.

Pada sisi lain, ulama adalah sumber legitimasi keagamaan dan penggerak perubahan masyarakat. Sebagaimana studi yang dilakukan oleh Horikoshi (1987), ditemukan bahwa ulama adalah sumber perubahan sosial; tidak saja bagi lingkungan pesantren akan tetapi juga masyarakat di sekitarnya. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh studi Geertz (1981) dimana ditunjukkan bahwa pengaruh kyai/ulama terletak pada makelar kultur (*cultural brokers*). Melalui pengaruhnya sebagai cultural brokers tersebut, ulama secara sosial mampu menjembatani berbagai kepentingan melalui bahasa yang paling mungkin digunakan.

Dalam perspektif ekonomi, ulama dapat diposisikan sebagai seorang *marketer* dalam sebuah bisnis. Dalam spiritual marketing, ulama menempati posisi sebagai *marketer* yang bermain pada wilayah *heart-share*. Wilayah ini mengajak calon konsumen untuk melakukan tindakan konsumsi dengan menggunakan potensi kejernihan hati yang didorong oleh sekumpulan nilai-nilai positif. Tindakan yang berbasis pada nilai-nilai positif ini akan berfungsi sebagai filter dari tindakan konsumsi yang terkontaminasi oleh polusi-polusi paradigma positifistik-materialistik. Tugas ini diemban oleh mereka yang dianggap sebagai figur yang mengawal kejernihan hati, mengawal nilai-nilai positif dan mengawal komunitas dari polusipolusi negatif; dan mereka itu adalah para ulama. Oleh karena itu, Marlina (2014) menyatakan pesantren kini memiliki peran dan fungsi strategis dalam pengembangan ekonomi, di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Agen perubahan sosial di bidang ekonomi syariah
- b. Laboratorium bisnis berbasis syariah
- c. Pusat pembelajaran ekonomi syariah

Metode Pencatatan SAK ETAP

SAK ETAP atau Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik adalah metode yang digunakan untuk pencatatan transaksi keuangan bagi entitas yang tidak memiliki tanggung jawab pelaporan terhadap masyarakat umum. Kehadiran SAK ETAP diharapkan dapat memberikan

kemudahan untuk UKM dan sejenisnya dalam menyajikan laporan keuangan. SAK ETAP juga diharapkan menjadi solusi permasalahan internal perusahaan, terutama bagi manajemen yang hanya melihat hasil laba yang diperoleh tanpa melihat kondisi keuangan yang sebenarnya.

Standar ini mulai diberlakukan pada Mei 2009 oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dengan tujuan memberikan kemudahan bagi perusahaan skala kecil dan menengah. SAK ETAP memberikan banyak kemudahan untuk suatu entitas dibandingkan dengan SAK Umum dengan ketentuan pelaporan yang lebih kompleks (Hariadi, 2010).

SAK ETAP ini sangat tepat jika digunakan oleh pesantren dengan karakteristik seperti yang dijelaskan di atas. Kemudahan yang diberikan dalam pencatatan keuangan dengan metode ini sangat memungkinkan pengelola pesantren dalam pembuatan laporan keuangan yang sederhana tanpa mengalihkan perhatiannya pada dunia pendidikan keagamaan. Selain itu, pencatatan keuangan dengan standar akuntansi ini juga dapat dipakai dalam merapikan dan menginventarisir laporan keuangan yang selama ini dianaktirikan oleh sebagian besar pengelola pesantren.

4. KESIMPULAN

Pemahaman yang baik terhadap pengelolaan keuangan pesantren mutlak diperlukan oleh para pengelolanya. Berangkat dari pemahaman inilah, para pengelola dapat memajemen keuangannya secara profesional, sehingga pesantren dapat memberikan kontribusi dalam kehidupan sosial-ekonomi masyarakat. Dari paparan di atas, dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

- a. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi dan penyuluhan pengelolaan keuangan pesantren di Kecamatan Cibadak Lebak Banten ini dinilai cukup berhasil. Terjadi peningkatan pemahaman tentang pencatatan laporan keuangan pesantren pada para pengelola pesantren yang mengikuti kegiatan. Semula konsentrasi pemahaman tentang pedoman pencatatan transaksi keuangan pesantren terdapat pada rentang nilai 0 - 60 sebesar 71%. Setelah mengikuti sosialisasi terjadi pergeseran, peserta dengan nilai tersebut turun menjadi 33%, dan sebanyak 77% peserta berhasil mendapatkan nilai antara 61-100.
- b. Peserta sangat responsif dan persepsi kebutuhan pengetahuan akan pencatatan transaksi keuangan pesantren cukup tinggi. Dari hasil evaluasi kegiatan diketahui persepsi atas relevansi topik yang diberikan dengan kebutuhan mencapai 65%, kepuasan peserta atas penyelenggaraan kegiatan mencapai 80% dan persepsi atas metode pelaksanaan kegiatan mencapai 87%.

5. DAFTAR PUSTAKA

- [IAI] Ikatan Akuntan Indonesia (xxxx), *Standar Akuntansi ETAP*, Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia.
- Azra, Azyumardi (1997), *Jaringan Ulama*, Bandung: Mizan.
- BPS Kabupaten Lebak (2016), *Kecamatan Cibadak Dalam Angka 2016*, Lebak: BPS Kabupaten Lebak.
- Clifford, Geertz, *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1981.
- Damopolii, Muljono (2011), *Pesantren Modern IMMIM Pencetak Muslim Modern*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Depag (2003), *Pondok Pesantren Dan Madrasah Diniyah*, Jakarta: Departemen Agama.
http://pbsb.ditpdpontren.kemenag.go.id/pdpp/loadpp?loadpp=&id_kabupaten=269&id_provinsi=36&page=1
- Mari, Libero Mario and Francesca Picciaia (2014), *The Accounting Methods of The "Opera Del Duomo" of Orvieto*, From Its Origins to The 16th Century Statute Reform: Single or Double-Entry Bookkeeping?, *Spanish Journal of Accounting History* No. 21. Hal. 49-72.
- Marlina (2014), *Potensi Pesantren dalam Pengembangan Ekonomi Syariah*, *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Vol. 12, No. 1, hal: 117-134.
- Mastuhu (2000), *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*, Jakarta: INIS.
- Masyhud, Sulthon (2005), *Manajemen Pondok Pesantren*, Jakarta: Dewi Putaka.
- Nafi, M. Dian, et al (2007), *Praktis Pembelajaran Pesantren.*, Yogyakarta: PT. LKIS Pelangi Aksara.
- Pratolo, Suryo (2001), *Double Entry Book Keeping dan Accrual Basis Sebagai Pendukung Akuntabilitas Sektor Publik*, *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Vol. 2 No. 2, hal: 105-114.